

**AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH: KAJIAN TERHADAP  
PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KECUKUPAN  
PENGUNGKAPAN, KETAATAN PERATURAN PERUNDANGAN, DAN  
EFEKTIVITAS PENGENDALIAN INTERN.**

***ACCOUNTABILITY OF GOVERNMENT AGENCY PERFORMANCE: A STUDY OF THE  
IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARDS, ADEQUACY OF  
DISCLOSURE, COMPLIANCE WITH STATUTES AND REGULATIONS, AND  
EFFECTIVENESS OF INTERNAL CONTROL.***

R. U. Siahaan\*, Fachruzzaman  
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.

\*Korespondensi Email: [melysiahaan05@gmail.com](mailto:melysiahaan05@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of the application of government accounting standards, adequacy disclosure, compliance regulations, and the effectiveness of internal control on the performance accountability of government agencies. The population in the study was the Regional Apparatus Organisation (OPD) of Bengkulu City. This study uses a quantitative approach using primary data as a questionnaire. The research sampling technique used purposive sampling with a sample size of 90 respondents, and the testing tool used multiple linear regression analysis. The results showed that the application of government accounting standards, adequacy disclosure, and the effectiveness of internal control had a positive and significant effect on the accountability of government agency performance. Meanwhile, compliance regulations do not show a significant impact on the accountability of government agency performance.*

**Key Words:** *Disclosure adequacy, Government agency performance accountability, Internal control effectiveness, Implementation of government accounting standards, Regulatory compliance.*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan peraturan perundangan, dan efektivitas pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam penelitian merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data primer berupa kuesioner. Teknik pengambilan sampel penelitian menggunakan purposive purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 90 responden dan alat pengujian menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, dan efektivitas pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sedangkan ketaatan peraturan perundangan tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Kata kunci:** Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, Efektivitas pengendalian intern, Kecukupan pengungkapan, Ketaatan peraturan perundangan, Penerapan standar akuntansi pemerintah.

## PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah merupakan aspek krusial untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Menurut Peraturan Menteri PANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, ada empat elemen utama yang diperlukan untuk menilai pertanggungjawaban ini: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi internal. Komponen ini dirancang untuk melihat bahwa pemerintah dapat menjalankan tugasnya secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil (Adam et al., 2022). Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, manfaat dari penerapan peraturan signifikan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, dan pertanggungjawaban pemerintah, serta kepercayaan terhadap masyarakat.

Pada pemerintahan Kota Bengkulu, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja belum sepenuhnya optimal. Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Kementerian PANRB menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bengkulu beberapa tahun belakangan ini masih di kategori B, yang mencerminkan bahwa kinerja birokrasi belum sepenuhnya terfokus pada hasil dan masih terdapat kelemahan yang ditemukan dalam program pengelolaan kegiatan serta pertanggungjawaban kinerja. Permasalahan seperti ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi, keterlambatan pelaporan, serta kurangnya efektivitas evaluasi internal masih menjadi kendala utama. Fenomena ini yang menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, diperlukan beberapa faktor pendukung yang telah diatur dalam berbagai regulasi. Seperti pada PP No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, yang dirancang untuk meningkatkan pertanggungjawaban terhadap kinerja instansi melalui pengukuran dan pelaporan yang sistematis. Maka, terdapat beberapa hal penting yang dapat berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu penerapan standar akuntansi

pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan peraturan perundangan, serta efektivitas pengendalian intern. Keterkaitan di antara variabel-variabel tersebut sejalan dengan teori stakeholder yang menekankan memenuhi kepentingan berbagai pihak yang terlibat atau terpengaruh oleh akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hubungan antara setiap variabel menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja pemerintah bukan hanya tentang pelaksanaan tugas administrasi, melainkan juga soal membangun kepercayaan kepada pemangku kepentingan.

Penerapan standar akuntansi pemerintah, sebagaimana diatur dalam PP No 71 Tahun 2010, berfungsi sebagai pedoman dalam pencatatan dan penyajian laporan keuangan pemerintah yang dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan. Penerapan SAP berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk membuat laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu dan sesuai ketentuan (Kartika & Sukanto, 2019). Penerapan SAP tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga mendukung penyajian informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Kota Bengkulu, kendala penerapan SAP sering kali berkaitan dengan terbatasnya pemahaman dan belum optimalnya sistem pencatatan berbasis aktual, sehingga berdampak pada keakuratan laporan kinerja. Pengungkapan informasi yang memadai menjadi tuntutan utama pemangku kepentingan di era keterbukaan informasi. Pengungkapan yang memadai mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atas segala program yang dijalankan terlaksana secara efektif. Oleh karena itu, pengungkapan informasi yang disediakan pemerintah harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, dan kejelasan agar mampu memberikan gambaran yang tepat berhubungan dengan kinerja dan pemanfaatan anggaran. Pada laporan kinerja di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu masih minim informasi substantif, sehingga menyulitkan pemangku kepentingan dalam memahami capaian kinerja pemerintah secara menyeluruh.

Pemerintah dalam melaksanakan kinerja dan tugasnya harus selalu menyesuaikan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, ketaatan terhadap peraturan perundangan menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Peraturan yang ditaati oleh pemerintah mampu menghasilkan laporan pertanggungjawaban yang layak serta akurat (Umam & Setiyowati, 2023). Meskipun, dalam realisasi yang terjadi masih ada pelanggaran administratif atau pelaporan yang tidak sesuai jadwal yang dilakukan oleh beberapa instansi pemerintah di Kota Bengkulu. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kapasitas kredibilitas dalam memahami dan menjalankan regulasi. Menurut PP No. 60 Tahun 2008, pengendalian intern merupakan suatu proses yang dibuat untuk memberikan kepastian yang memadai dalam mencapai efektivitas, efisiensi, ketaatan peraturan, dan keandalan penyampaian laporan pemerintah. Sistem pengendalian intern yang efektif mampu mendeteksi dan mencegah potensi kesalahan atau penyimpangan sejak dini, serta memastikan bahwa sumber daya dimanfaatkan dengan optimal. Namun pelaksanaan pengendalian intern di beberapa instansi pemerintah Kota Bengkulu masih bersifat formalitas, tanpa evaluasi yang mendalam, sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi serta penyalahgunaan sumber daya. Berdasarkan fenomena diatas, penelitian ini memfokuskan perhatian pada pengaruh penerapan SAP, kecukupan pengungkapan, ketaatan peraturan perundangan, dan efektivitas pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kota Bengkulu. Penelitian ini didasarkan pada teori stakeholder, yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dan harapan semua pihak yang terlibat atau terdampak oleh kinerja pemerintah. penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan strategis bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap pemerintah.

### **Teori Stakeholder**

Teori stakeholder pertama kali diperkenalkan oleh R. Edward Freeman tahun 1984, teori stakeholder sebagai sebuah pendekatan

strategis dalam manajemen yang menekankan pentingnya memperhatikan semua pihak yang memiliki kepentingan pada keberlangsungan perusahaan (Freeman et al., 2019). Teori stakeholder merupakan kerangka struktural yang dipergunakan untuk menghasilkan manfaat dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas program, dan tetap memfokuskan kepada tujuan utamanya yaitu memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Teori ini menjelaskan bahwa keberadaan sebuah entitas bergantung kepada dukungan pemangku kepentingan, sehingga pengambilan keputusan harus mempertimbangkan pendapat dari pemangku kepentingan (Zain, 2021).

Strategi yang dilakukan dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan adalah dengan membuat pelaporan (Kartika & Sukanto, 2019). Pelaporan merupakan strategi dalam mengatur kepercayaan pemangku kepentingan, di mana kehadiran pemangku kepentingan mempengaruhi pemikiran manajemen terhadap kepentingan praktik akuntansi. Oleh karena itu, untuk membuat pelaporan perlu diperhatikan beberapa hal seperti penerapan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan peraturan perundangan, serta efektivitas pengendalian intern. Pelaksanaan yang baik sesuai dengan ketentuan mampu menghasilkan laporan yang dapat diandalkan, relevan, dan dapat mudah dimengerti oleh para pemangku kepentingan.

### **Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Akuntabilitas (accountability) memiliki arti sebagai pertanggungjawaban atau sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas adalah istilah yang dipakai dalam menjelaskan tingkat tanggung jawab dari entitas yang berhubungan pada sistem manajemen yang ditetapkan (Meme & Subardjo, 2019). Kinerja dapat diartikan sebagai cerminan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam meraih tujuan suatu organisasi. Sementara itu, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban setiap entitas untuk menjelaskan dan bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan mereka dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Tambajong et al., 2024). Pertanggungjawaban yang baik diyakini mampu mengubah keadaan

pemerintah menuju sistem pemerintah yang baik. Akuntabilitas kinerja digambarkan sebagai sebuah tingkat kesesuaian pelaksanaan kegiatan, kebijakan, serta program dalam menciptakan tujuan dan sasaran, serta visi misi organisasi (Harjaningrum & Ardini, 2021). Salah satu hal yang dapat digunakan dalam menilai akuntabilitas pemerintah adalah dengan melihat pelaksanaan pembangunan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, pengukuran kinerja pemerintah penting diperlukan untuk mengetahui bagaimana pemerintah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya (Novatiani et al., 2019).

### **Standar Akuntansi Pemerintah**

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan prinsip akuntansi yang dibuat untuk menyajikan serta menyusun laporan keuangan pemerintah, dan dibentuk oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) serta ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. SAP disusun dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam membuat laporan pertanggungjawaban pemerintah (Kartika & Sukanto, 2019). Prinsip akuntansi yang terdapat pada SAP merupakan hukum yang mengikat sehingga wajib untuk diterapkan oleh pemerintah baik pusat ataupun daerah. Penerapan SAP yang tepat, menjadikan informasi laporan keuangan pemerintah sebagai dasar mewujudkan transparansi, pengambilan keputusan serta akuntabilitas (Riyani & Widajantie, 2022). Penerapan SAP bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan yang berkualitas, guna memenuhi kebutuhan para pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (Mujannah et al., 2022). Ini artinya informasi keuangan pemerintah mampu digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintahan serta mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kinerja. Melalui penerapan SAP, pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan terhadap keterbukaan informasi dan kejelasan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya publik. Dengan demikian, penerapan standar akuntansi pemerintah mendukung terwujudnya prinsip dasar teori stakeholder, yaitu tanggungjawab sosial,

akuntabilitas, dan keterlibatan pihak berkepentingan dalam proses pemerintahan.

### **Kecukupan Pengungkapan**

Pengungkapan informasi dan transparansi yang akuntabel adalah tujuan dari pelaporan akuntabilitas kinerja pemerintah. Kecukupan informasi dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan laporan yang dibuat oleh pemerintah atas dasar pertanggungjawabannya terhadap seluruh program atau kegiatan yang telah dilaksanakan. Pengungkapan cukup dibuat untuk tujuan memenuhi kewajiban dalam memberikan informasi dengan memenuhi standar yang diharuskan terutama informasi yang wajib disajikan sesuai dengan arahan lembaga terkait. Kecukupan pengungkapan pada akuntabilitas kinerja merupakan prinsip yang memastikan bahwa informasi mengenai kinerja pemerintah disajikan lengkap, akurat, dan transparan untuk seluruh pemangku kepentingan. Dengan pengungkapan, pemangku kepentingan dapat menilai pertanggungjawaban pemerintah dalam penggunaan sumber daya dengan efisien dan efektif, serta dalam pencapaian tujuan pemerintah.

### **Ketaatan Peraturan Perundangan**

Ketaatan peraturan perundangan merupakan kepatuhan seseorang atau entitas kepada regulasi yang ditetapkan oleh pejabat dan lembaga negara yang memiliki kekuatan untuk mengikat. Ketentuan hukum dibentuk sebagai maksud membenahi dan memelihara keteraturan pada masyarakat (Pertiwi & Utami, 2020). Peraturan perundangan mampu dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan pengabdian dan layanan kepada masyarakat sebagai bentuk pemenuhan tugas. Kepatuhan pada peraturan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menjadikan laporan pertanggungjawaban yang dirancang menjadi lebih akurat. Kepatuhan pada regulasi dapat mendorong terbentuknya sebuah program kerja yang jika tingkat kepatuhannya tinggi, maka mampu membantu pemerintah mencapai tujuannya dalam meningkatkan kinerja yang baik (Umam & Setiyowati, 2023). Ketaatan peraturan perundangan menunjukkan komitmen pemerintah untuk bertindak sesuai dengan norma dan harapan pemangku kepentingan, terutama dalam hal keadilan,

akuntabilitas, serta kepercayaan publik. Dengan demikian, ketaatan peraturan perundangan menjadi salah satu bentuk nyata pelaksanaan pada teori stakeholder dalam praktik pemerintahan.

### **Efektivitas Pengendalian Intern**

Pengendalian internal ialah sebuah prosedur yang dibuat untuk membantu organisasi dalam mewujudkan pencapaian mereka melalui sistem pemantauan yang sistematis. Proses ini terdiri dari prosedur, kebijakan, serta praktik yang dilakukan oleh seluruh bagian dalam organisasi. Hal ini membuat pemerintah dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik agar dapat memberi hasil yang sesuai pada tujuan yang telah ada (Vitriany & Subardjo, 2020). Pengendalian intern digunakan pemerintah sebagai tolak ukur untuk melihat seberapa besar efektivitas kegiatan pada pemerintahan. Efektivitas pengendalian intern merupakan keberhasilan pemerintah dalam memahami fungsi dan tugasnya dalam melaksanakan semua program yang telah direncanakan (Irawati et al., 2023). Keberhasilan pengendalian intern membantu masyarakat dalam menilai dan memberikan keputusan terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan pemerintah. hal ini didasarkan pada teori stakeholder, yang mana pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada masyarakat yang sebagai pemangku kepentingan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang dipakai merupakan penelitian kuantitatif dengan metode kuesioner atau angket, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data numerik melalui serangkaian pernyataan yang disusun secara sistematis. Untuk penelitian kuantitatif, dasar hubungan seluruh variabel akan dianalisis dengan alat uji statistik (Siroj et al., 2024). Populasi diambil dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu berjumlah 38 OPD, yang terdiri dari berbagai Dinas, Kantor, Badan, dan Kecamatan. Metode sampel yang dipakai adalah purposive sampling dengan kriteria sampel yang diberikan adalah harus memiliki masa kerja minimal dua tahun dan merupakan pengelola

di bidang keuangan, pelaksana teknis kegiatan, serta bendahara. Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh jumlah sampel sebanyak 90 responden dari 29 OPD yang telah memenuhi syarat untuk mewakili populasi. Menganalisis data menggunakan bantuan perangkat lunak statistik berupa SPSS versi 27.

Variabel independen terdiri dari penerapan standar akuntansi pemerintah yang diukur melalui perlakuan prinsip akuntansi, prinsip realisasi, dan prinsip kewajaran; kecukupan pengungkapan yang dinilai dari catatan atas laporan keuangan; ketaatan peraturan perundangan yang mencakup penyampaian laporan tepat waktu, tidak pernah mendapatkan sanksi, dan mentaati peraturan yang berlaku; serta efektivitas pengendalian yang menggunakan penilaian risiko, lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pengamatan. Variabel dependen berupa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diukur dengan akuntabilitas proses, akuntabilitas program, serta akuntabilitas hukum dan kejujuran. Metode analisis data yang dipakai terdiri dari:

Statistik deskriptif dilakukan untuk melihat gambaran umum dari data penelitian yang meliputi nilai min, max, mean, dan standar deviasi terhadap masing-masing variable. Uji validitas dilakukan untuk menilai valid atau tidaknya suatu pernyataan. Untuk mengukurnya dilakukan menggunakan uji statistik Product Moment Pearson Correlation. Yang mana valid apabila nilai  $r$  hitung  $> r$  tabel, dan nilai signifikansi  $< 0,05$ . Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui bahwa suatu kuesioner dikatakan andal jika respon terhadap pernyataan konsisten dari waktu ke waktu. Dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach's Alpha  $> 0,70$ .

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Pengujian dilaksanakan dengan uji Kolmogorov-Smirnov. Dikatakan normal apabila nilai tingkat sig.  $> 0,05$ .

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah regresi menunjukkan adanya koneksi di antara variabel bebas. Pengujian yang bagus seharusnya tidak terjadi korelasi

antar variabel independen. Model regresi bebas dari multikolinearitas apabila nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians dari residual atas suatu pengamatan dalam sebuah model regresi. Model yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas (Meme & Subardjo, 2019). Jika terdapat pola yang jelas, dan titik-titik yang menyebar dibawah dan di atas angka pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Penelitian ini menggunakan regresi linear berganda dalam menganalisis hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Analisis dipakai dalam melihat adanya pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, ketaatan peraturan perundangan, dan efektivitas pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Model yang digunakan dalam analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$AKIP = \alpha + \beta_1SAP_1 + \beta_2KP_2 + \beta_3KPP_3 + \beta_4EPI_4 + \varepsilon$$

Ket:

AKIP = Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

PSAP = Penerapan standar akuntansi pemerintah

KP = Kecukupan pengungkapan

KPP = Ketaatan peraturan perundangan

EPI = Efektivitas pengendalian intern

$\varepsilon$  = Error

Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel secara terpisah, diperlukan uji t yang digunakan untuk melihat apakah pengaruh yang terjadi bersifat signifikan atau tidak. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila sig < 0,05, maka hipotesis diterima. Sedangkan apabila sig > 0,05, maka hipotesis ditolak.

Pengujian koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variabel terikat. Jika R<sup>2</sup> makin besar (mendekati satu), maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan pengaruh variabel independen dan variabel dependen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan sampel pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bengkulu. Jumlah kuesioner yang dikirim adalah sebanyak 114 kuesioner dan kembali sebanyak 90 kuesioner. Adapun distribusi penyebaran kuesioner disajikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Distribusi Penyebaran Kuesioner**

Keterangan	Jumlah
Kuesioner disebarkan	114
Kuesioner tidak kembali	24
Kuesioner kembali dan dapat diolah	90

Sumber: Olah Data SPSS, Hasil Penelitian 2025

## Uji Statistik Deskriptif

Tabel 2. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PSAP	90	10	20	17,78	1,859
KP	90	13	20	17,96	1,728
KPP	90	14	20	18,57	1,565
EPI	90	50	69	62,34	4,407
AKIP	90	21	30	26,76	2,255

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil diatas, kelima variabel menunjukkan nilai rata-rata yang cenderung tinggi, yang dapat diinterpretasikan bahwa tanggapan responden terhadap variabel-variabel yang diukur bersifat positif.

## Uji Validitas

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Pernyataan	r hitung	r tabel	Status
X1.1 – X1.4	0,690 – 0,788	0,207	Valid
X2.1 – X2.4	0,613 – 0,829	0,207	Valid
X3.1 – X3.4	0,604 – 0,801	0,207	Valid
X4.1 – X4.14	0,315 – 0,708	0,207	Valid
Y1 – Y6	0,519 – 0,767	0,207	Valid

Sumber: Olah Data, 2025

Tingkat validitas yang tinggi mencerminkan bahwa instrumen penelitian yang digunakan memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur variabel yang dimaksud secara tepat sesuai dengan tujuan pengukuran.

## Uji Reliabilitas

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Cronbach's Alpa	Nilai Batas	Status
PSAP	0,714	0,70	Reliable
KP	0,707	0,70	Reliable
KPP	0,712	0,70	Reliable
EPI	0,815	0,70	Reliable
AKIP	0,716	0,70	Reliable

Sumber: Olah Data, 2025

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diolah pada data, menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha pada setiap variabel memiliki nilai > 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa data sudah reliabel atau handal.

**Uji Normalitas**

**Tabel 5. Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
	N	90
Normal Parameters <sup>a, b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,45573330
	Most Extreme Differences	
	Absolute	0,049
	Positive	0,027
	Negative	-0,049
Test Statistic		0,049
Asymp. Sig. (2-tailed) <sup>c</sup>		0,200 <sup>d</sup>

Sumber: Olah Data, 2025

Uji *Kolmogorov-Smirnov* mendapatkan nilai sig. sebesar 0,200 yaitu  $0,200 > 0,05$ , yang berarti data terdistribusi normal dan layak untuk dianalisis.

**Uji Multikolinearitas**

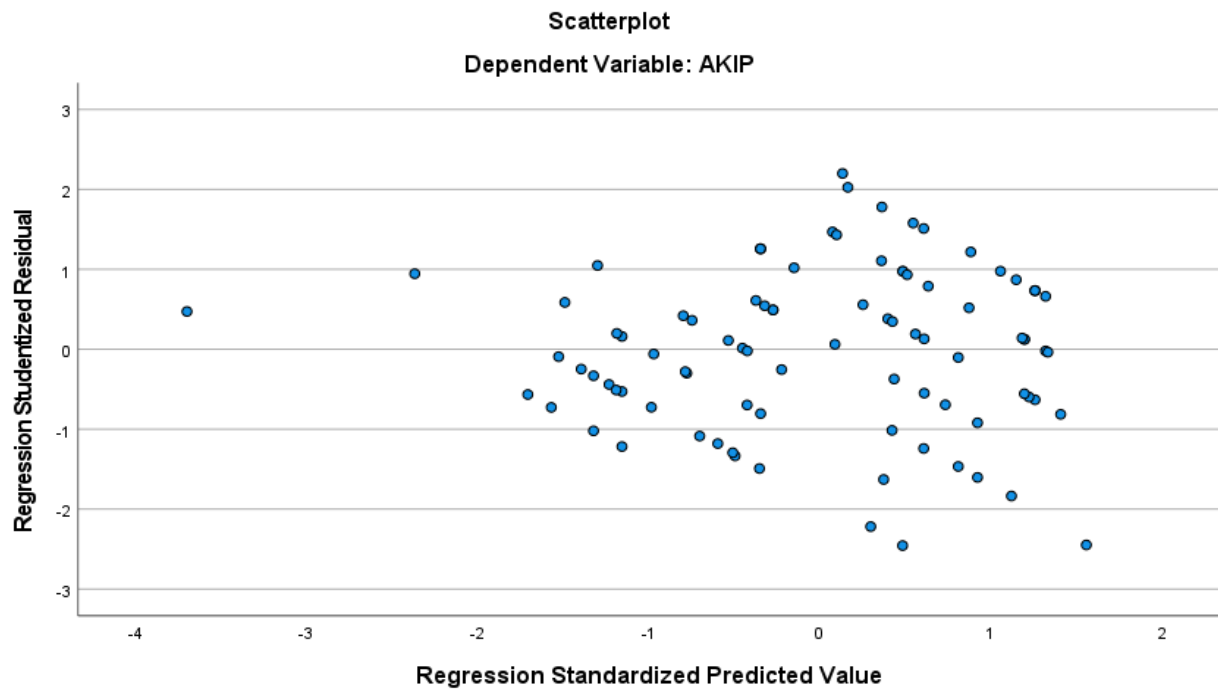
**Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas**

Variabel	Collinearity Statistics	
	Nilai Tolerance	Nilai VIF
PSAP	0,575	1,739
KP	0,701	1,427
KPP	0,768	1,302
EPI	0,549	1,820

Sumber: Olah Data, 2025

Uji multikolinearitas menunjukkan tidak ada korelasi antara variabel independen pada data, hal ini karena semua variabel memiliki VIF < 10 dan nilai tolerance > 0,01.

### Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Olah Data, 2025

**Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Hasil grafik *scatterplot* diatas memperlihatkan bahwa titik-titik meluas secara acak dan tidak fokus pada satu tempat.

Hasil ini membuktikan bahwa tidak terjadi gejala heterokedastisitas.

### Uji Hipotesis

**Tabel 7. Hasil Uji Statistik t**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t hitung	Sig.
(Constant)	6,437	2,522		2,522	0,012
PSAP	0,666	0,112	0,549	5,951	0,000
KP	0,236	0,109	0,181	2,166	0,033
KPP	-0,129	0,115	-0,090	-1,122	0,265
EPI	0,106	0,048	0,208	2,198	0,031

Sumber: Olah Data, 2025

Didapatkan hasil persamaan sebagai berikut:

$$AKIP = 6,437 + 0,666PSAP + 0,236KP - 0,129KPP + 0,106EPI + \epsilon$$

H<sub>1</sub> = Penerapan standar akuntansi pemerintah mempunyai pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini terbukti dari nilai t hitung sebesar 5,951 dengan tingkat signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga hipotesis pertama (H1) dinyatakan diterima.

H<sub>2</sub> = Kecukupan pengungkapan menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,166 dan tingkat signifikansi  $0,033 < 0,05$ , sehingga hipotesis kedua (H2) dapat diterima.

H<sub>3</sub> = Ketaatan peraturan perundangan memberikan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut terlihat dari nilai t hitung sebesar -1,122 dengan tingkat signifikansi  $0,265 > 0,05$ , sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak

H<sub>4</sub> = Efektivitas pengendalian intern memiliki dampak positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 2,198 dan tingkat signifikansi  $0,031 < 0,05$ , sehingga hipotesis keempat (H4) diterima.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

**Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,764 <sup>a</sup>	0,583	0,564	1,490

Sumber: Olah Data, 2025

Pada uji>koefisien determinasi, menghasilkan nilai Adjusted R Square>sebesar 0,564 yang menyatakan bahwa variabel dependen

dipengaruhi variabel independent sebesar 56,4%. Dan terdapat 43,6% faktor lain diluar model yang dapat mempengaruhi.

**Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengujian terhadap hipotesis pertama memperlihatkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas instansi pemerintah di OPD Kota Bengkulu. Dengan kata lain, semakin optimal penerapan SAP, maka tingkat akuntabilitas kinerja OPD juga akan meningkat. Penerapan SAP menjadikan penyajian laporan keuangan menjadi lebih transparan, andal serta mampu dipertanggungjawabkan. Penyajian informasi yang sesuai standar mempermudah pemangku kepentingan dalam menilai kinerja pemerintah, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan dan mempertahankan budaya akuntabilitas kinerja pada pemerintahan. Temuan penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan Fitri (2024), yang menyimpulkan bahwa penerapan standar

akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Pengaruh Kecukupan Pengungkapan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengujian terhadap hipotesis kedua memperlihatkan bahwa kecukupan pengungkapan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Bengkulu. Artinya, semakin lengkap dan terpenuhinya informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan maupun laporan kinerja, semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas kinerja tersebut. Kecukupan pengungkapan memberikan gambaran yang transparan mengenai penggunaan sumber daya, pencapaian kegiatan, dan persamaan antara rancangan dengan realisasi. Oleh karena itu, pemangku kepentingan memiliki informasi

yang memadai dalam melakukan evaluasi dan penilaian terhadap pemerintah.

### **Pengaruh Ketaatan Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengujian terhadap hipotesis ketiga memperlihatkan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak memberikan pengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Bengkulu. Artinya, memperlihatkan bahwa meskipun ketaatan peraturan perundangan merupakan hal yang penting, tetapi untuk penelitian ini, tidak terdapat hubungan yang mempengaruhi tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Oktaviani (2018) yang menyatakan bahwa ketaatan peraturan perundangan tidak mampu mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **Pengaruh Efektivitas Pengendalian terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Pengujian terhadap hipotesis keempat pada penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di OPD Kota Bengkulu. Artinya, semakin efektif pengendalian intern yang diterapkan, maka semakin baik juga akuntabilitas kinerja yang mampu tercapai. Pengendalian intern yang efektif terdiri dari prosedur, kebijakan, serta mekanisme yang menjamin bahwa sumber daya dimanfaatkan dengan efisien, laporan yang dibuat dengan akurat, hingga risiko yang muncul diatasi. Dengan demikian, efektivitas pengendalian intern yang baik memperkuat pengawasan dan transparansi, serta memotivasi pemerintah agar lebih bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan penelitian Harjaningrum & Ardini (2021) yang menyebutkan bahwa pengendalian intern berpengaruh pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan, dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut: (1) Penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas penerapan standar akuntansi, maka transparansi dan akuntabilitas kinerja juga akan semakin meningkat. (2) Kecukupan pengungkapan memiliki pengaruh yang signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga semakin lengkap yang disampaikan, maka semakin tinggi pula tingkat akuntabilitas yang dapat diwujudkan. (3) Ketaatan peraturan perundangan tidak berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga memperlihatkan bahwa meskipun penting, kepatuhan semata tidak cukup meningkatkan akuntabilitas tanpa didukung faktor-faktor lain. (4) Efektivitas pengendalian intern berpengaruh signifikan pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, mengindikasikan bahwa pengendalian yang kuat mampu memperkuat pertanggungjawaban kinerja secara akuntabel.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan seperti, pada cakupan wilayah penelitian yang tergolong sempit, jumlah responden yang terbatas, serta kurang mempertimbangkan indikator lain yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Maka, saran untuk penelitian selanjutnya adalah dengan memperluas area penelitian, menambahkan kriteria responden, dan menambahkan faktor-faktor terkait lainnya, serta pendampingan terhadap responden dalam menjawab kuesioner sehingga dapat memberikan jawaban yang akurat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- A. Rahmawati, P. Simorangkir, R. G. 2021. Pengaruh Akuntansi Forensik, Skeptisme Profesional Auditor, Dan Pengalaman Audit Terhadap Deteksi Fraud. *Jurnal Akunida*, 7(2): 113–122.
- Adam et al. 2022. Pengaruh Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, Dan Capaian Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja.

- Jurnal Magister Manajemen Nobel Indonesia*, 3(6): 1086 – 1098.
- Bierman, H. 2021. Moderasi Kedekatan Superior Dan Subordinat Pada Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Manajerial. *Jurnal Akunida*, 7(1): 30–42.
- Freeman, R. E. et al. 2019. Stakeholder Theory: The State of the Art. *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11.
- Harjaningrum, E. A., & Ardini, L. 2021. Analisis Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pengendalian Internal Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(1).
- Irawati et al. 2023. Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malinau. *JURNAL MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 6(2): 117–137.
- Kartika, R. D., & Sukamto. 2019. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Kinerja Instansi Pemerintah ( Studi Empiris Pada Dinas Daerah Kota Surabaya ). *Liability*, 01(2): 63–83.
- KemenpanRB. 2018. Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021. *Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021*, vol. 151: 10–17.
- Kusuma, I. et al. 2021. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Evaluasi Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akunida*, 7(2): 217–230.
- Meme, M. E., & Subardjo, A. 2019. Pengaruh Pengawasan Fungsional, Transparansi, Akuntabilitas Dan Pelayanan Publik Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10): 1–19.
- Mujannah, M. et al. 2022. Dampak Accrual Basic dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah. *Owner*, 6(3): 3065–3076.
- Novatiani, A. et al. 2019. Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 10(1): 51–62.
- Peraturan pemerintah RI. 2008. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Peraturan Pemerintah RI. 2010. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Pertiwi, R. U., & Utami, E. R. 2020. Pengaruh sistem pengendalian intern dan ketaatan pada peraturan perundangan dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. *Proceeding of National Conference on Accounting & Finance*, 2: 98–118.
- Republik Indonesia. 2020. Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*. <https://www.jurnal.id/id/blog/standar-akuntansi-pemerintahan-dalam-akuntansi-pemerintah-adalah/>.
- Riyani, A. A., & Widajantie, T. D. 2022. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Dan Akuntansi)*, 6(2): 477–486.
- Siroj, R. A. et al. 2024. Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7: 11279–11289.
- Tambajong, I. I. Y. et al. 2024. Analisis

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2): 127–135.

Umam, M. S., & Setiyowati, A. D. 2023. Pengaruh Akuntabilitas , Transparansi , Komitmen Aparatur , Kepatuhan Pada Regulasi Terhadap Kinerja Aparatur Daerah. *InFestasi*, 19(1): 91–102.

Vitriany, U. W. A., & Subardjo, A. 2020. Pengaruh Sasaran Anggaran, Pengendalian Internal, Dan Kualitas SDM Terhadap Akuntabilitas Kinerja OPD Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(7): 1–19.

Wulandari, S. et al. 2021. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Financial Distress, Dan Audit Tenure Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Jurnal Akunida*, 7(1): 85–98.

Zain, R. N. W. 2021. Implementation of CSR Activities from Stakeholder Theory Perspective in Wika Mengajar. *Jurnal Abiwara : Jurnal Vokasi Administrasi Bisnis*, 3(1): 102–107.